

# PANDUAN SDGs

Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten)  
dan Pemangku Kepentingan Daerah

**Disusun oleh:**

Mickael B. Hoelman

Bona Tua Parlinggoman Parhusip

Sutoro Eko

Sugeng Bahagijo

Hamong Santono

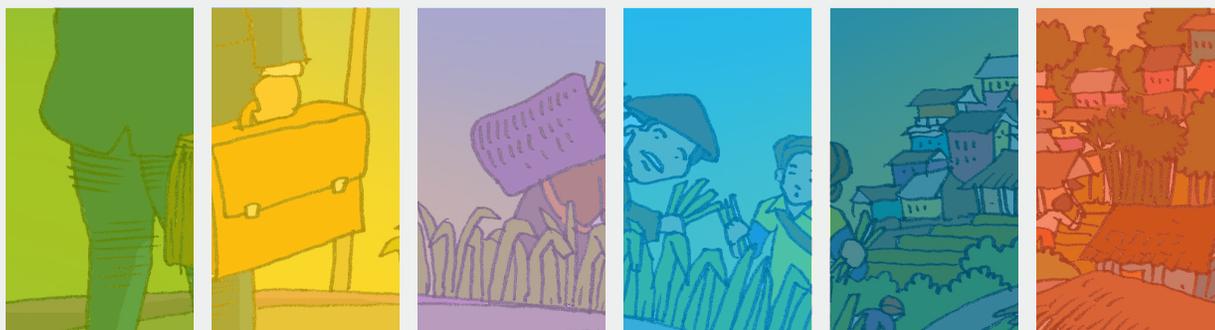


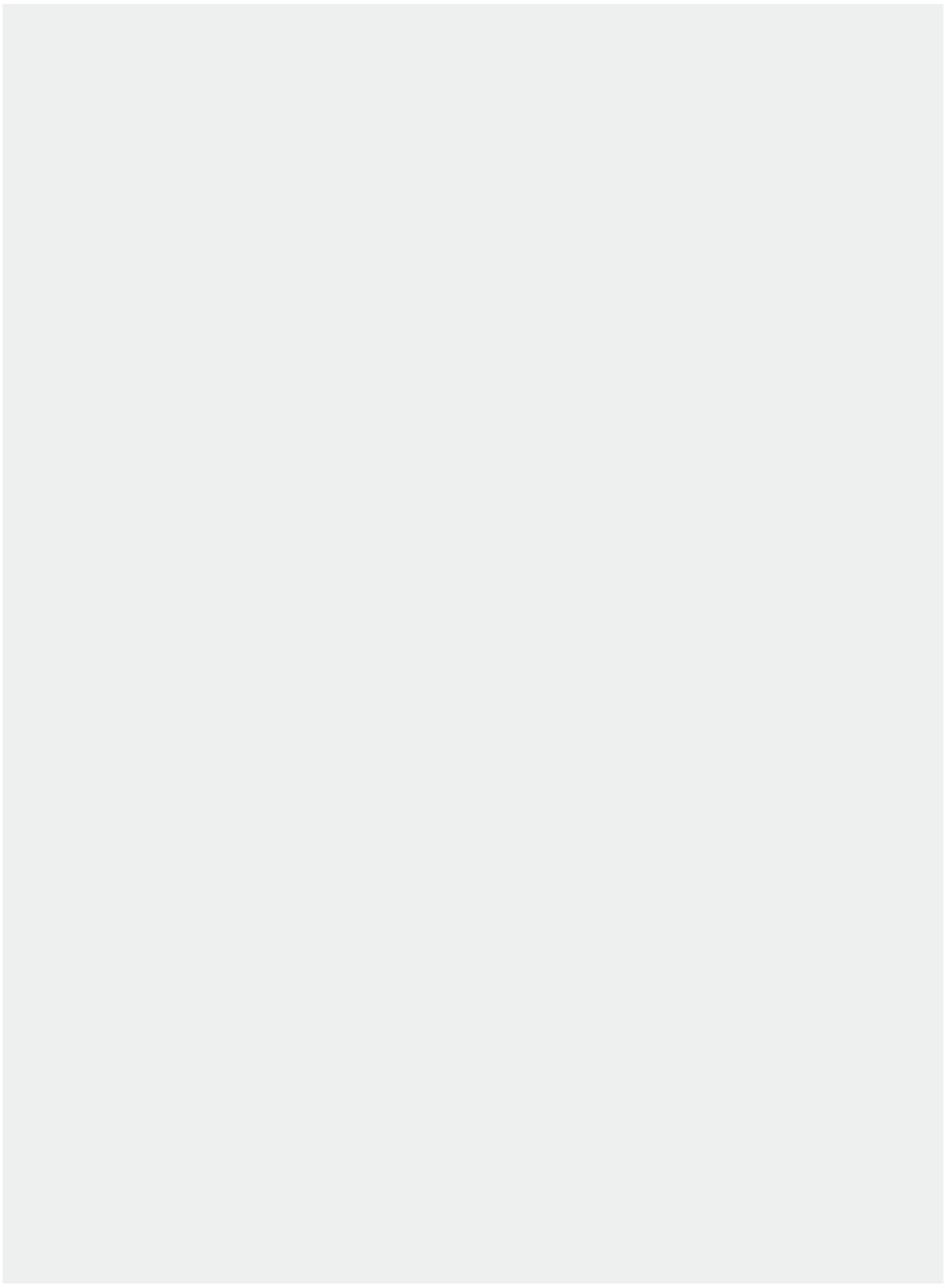
November 2015



# PANDUAN SDGs

Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten)  
dan Pemangku Kepentingan Daerah





# Daftar Isi

<b>Daftar Singkatan</b>	<b>2</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>7</b>
Mengapa	8
Tujuan	9
Cakupan	10
Proses penyusunan	10
<hr/>	
<b>BAB 2 INFORMASI</b>	<b>13</b>
Tentang SDGs	13
SDGs dan Nawacita	16
SDGs dan Pemerintah Daerah	19
MDGs dan Hal–Hal yang Belum Selesai	22
<hr/>	
<b>BAB 3 INSPIRASI</b>	<b>31</b>
Inspirasi dari Kota dan Kabupaten di Indonesia	31
Inspirasi dari kota–kota dunia	46
<hr/>	
<b>BAB 4 MELAKSANAKAN SDGS DI DAERAH</b>	<b>55</b>
Rencana Aksi	55
Panitia Pelaksana	58
Kelembagaan	58
Pendanaan	60
Mekanisme Akuntabilitas	62
Sosialisasi	62
<hr/>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>64</b>

# Daftar Singkatan

<b>AKB</b>	: Angka Kematian Bayi
<b>AKI</b>	: Angka Kematian Ibu
<b>APBD</b>	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>APBG</b>	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
<b>APBK</b>	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
<b>APBN</b>	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
<b>Bappeda</b>	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Bappenas</b>	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>BPS</b>	: Badan Pusat Statistik
<b>BUMD</b>	: Badan Usaha Milik Daerah
<b>BUMN</b>	: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
<b>GRK</b>	: Gas Rumah Kaca
<b>HIV/AIDS</b>	: <i>human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome</i>
<b>ICLEI</b>	: International Council for Local Environmental Initiatives
<b>IDB</b>	: Inter-American Development Bank
<b>IPM</b>	: Indeks Pembangunan Manusia
<b>Jamkesda</b>	: Jaminan Kesehatan Daerah
<b>KBD</b>	: Kemitraan Bidan dan Dukun
<b>KIS</b>	: Kartu Indonesia Sehat
<b>KJS</b>	: Kartu Jakarta Sehat
<b>LAMG</b>	: Local Authorities Major Group 's
<b>LSM</b>	: Lembaga Swadaya Masyarakat
<b>MDGs</b>	: <i>Millenium Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Milenium)
<b>Musrena</b>	: Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan
<b>Musrenbang</b>	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
<b>nrg4SD</b>	: The Network of Regional Governments for Sustainable Development
<b>OECD</b>	: Organisation for Economic Co-operation and Development
<b>PBB</b>	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

<b>PPLS</b>	: Pendataan Program Perlindungan Sosial
<b>RAD</b>	: Rencana Aksi Daerah
<b>Renaksi</b>	: Rencana Aksi
<b>Riskesdas</b>	: Riset Kesehatan Dasar
<b>RPJMD</b>	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>RPJMN</b>	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
<b>SDGs</b>	: <i>Sustainable Development Goals</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
<b>SKPD</b>	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
<b>TPA</b>	: Tempat Pembuangan Akhir
<b>TPS</b>	: Tempat Pembuangan Sampah
<b>UCLG</b>	: United Cities and Local Governments
<b>UN Habitat</b>	: United Nations Human Settlements Programme
<b>UNESCO</b>	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
<b>Unicef</b>	: United Nations Children’s Fund (Badan PBB untuk Anak–Anak)

# Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan sehingga akhirnya kami bisa mempersembahkan *Buku Panduan untuk Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Ide penyusunan buku ini telah ada sejak lebih dari satu tahun lalu, namun proses negosiasi perumusan Agenda SDGs yang belum berakhir saat itu, menjadikan penyusunan buku ini sedikit terhambat. Buku ini kami persembahkan khusus untuk pemerintah daerah, mengingat peran penting Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan selama ini.

Buku ini berisi tentang pelbagai informasi mengenai Agenda SDGs dan praktik-praktik terbaik yang ada di Indonesia dalam kerangka pembangunan manusia. Tidak hanya itu, buku ini juga memberikan usulan-usulan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk sesegara mungkin melaksanakan Agenda SDGs.

Kami berharap buku ini akan membantu Pemerintah Daerah untuk dapat mengetahui pelbagai hal mengenai Agenda SDGs serta langkah-langkah strategis

yang mungkin dan harus dilakukan. Hingga pada akhirnya pemerintah daerah mampu mendesain kebijakan yang cepat dan tepat bagi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, kualitas hidup warga yang lebih baik, dan bumi yang berkelanjutan.

Panduan ini kiranya juga diharapkan akan mendorong upaya-upaya yang lebih baik dari Pemerintah Pusat, untuk dapat melaksanakan Agenda SDGs dan bagi masyarakat sipil juga dapat dimanfaatkan untuk membantu memperkuat upaya-upaya advokasi yang selama ini telah dilakukan.

Akhir kata, kami menghaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Mickael Bobby Hoelman beserta tim, yang telah berupaya keras menyusun dan menyelesaikan buku panduan ini.

Jakarta, 22 November 2015

**Hamong Santono**

Senior Program Officer SDGs-INFID



## BAB 1

# PENDAHULUAN

Gagasan menyusun panduan ini terutama didorong oleh observasi bahwa informasi mengenai *Sustainable Development Goals* atau SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di Indonesia masih *terlalu sedikit*. Sementara itu, informasi yang dikandung di dalam SDGs ternyata *terlampau banyak* dan tidak semua *mudah dipahami*.

SDGs dapat dipahami dalam berbagai dimensi yang berbeda; (i) kronologinya dan prosesnya; (ii) tujuan dan targetnya dan di dalamnya skala perubahan yang diimpikannya; (iii) proses perundingannya; serta (iv) perbedaan dibandingkan pendahulunya, *Millenium Development Goals* (MDGs).

Di sisi lain, mengapa pemerintah daerah? Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup warga, dalam praktiknya, sangat ditentukan oleh baik-buruknya kinerja pemerintah daerah, mulai dari soal kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, hingga kualitas sekolah dan pelayanan kesehatan. Kita semua tergantung pada tinggi-rendahnya mutu pelayanan publik di daerah.

Bahkan, hal ini bukan saja gejala Indonesia tetapi juga sebuah arus di tingkat dunia. Benjamin Barber, dalam buku *If Major Ruled The World* (2013), meletakkan harapan kepada para wali kota untuk mengatasi masalah-masalah besar dunia (perubahan iklim, pencegahan terorisme, pengurangan kemiskinan, tata niaga perdagangan obat). Merekalah tenaga dan energi perubahan.

Menurut Barber, ada tiga alasan yang menyebabkannya: (i) kota merupakan hunian bagi lebih dari separuh penduduk dan karenanya merupakan mesin penggerak ekonomi; (ii) kota telah menjadi rumah pencetus dan inkubator berbagai inovasi sosial, ekonomi dan budaya; dan (iii) para pemimpin kota dan pemerintah daerah tidak terbebani dengan isu kedaulatan serta batas-batas bangsa yang menghalangi mereka untuk bekerja sama.

## Mengapa

Jika ada satu singkatan yang paling banyak menjadi berita pada tahun 2015, salah satunya yang menonjol adalah **SDGs** [dibaca: *esdigi*], *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

SDGs adalah (a) sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. Masa berlakunya 2015–2030; (b) sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 *goals* dan 169 sasaran pembangunan.

Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (*konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan*) dan negara–negara berkembang (*kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum*).

Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari *peranan penting pemerintah daerah*. Karena pemerintah kota dan kabupaten (a) berada lebih dekat dengan warganya; (b) memiliki wewenang dan dana; (c) dapat melakukan berbagai inovasi; serta (d) ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah.

Dari pengalaman era MDGs (2000–2015), Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan

penurunan prevalansi AIDS dan HIV.

Mengapa? Karena pemerintah daerah tidak aktif terlibat di dalam pelaksanaan MDGs. Juga karena pemerintah daerah kurang didukung. Bagaimana agar pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lebih siap dan lebih mampu melaksanakan SDGs? Salah satu upaya untuk mendorong keberhasilan SDGs di daerah adalah melalui penyediaan *informasi yang cukup bagi pemerintah daerah*.

Buku ini disusun dengan tujuan menjadi alat bantu bagi siapa saja tetapi terutama ditujukan bagi para kepala daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinas–dinas dan para pemangku kepentingan di daerah seperti kelompok masyarakat sipil dan media massa daerah. Buku ini disusun secara sederhana agar dapat segera menjadi *referensi* bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah.

Meski disebut “panduan”, buku ini disusun dengan menyadari keragaman kondisi daerah–daerah di Indonesia (demografi, kepadatan penduduk, perkotaan, perdesaan), sehingga tidak menawarkan suatu cetak biru atau resep yang kaku (*one size fits all*), namun lebih bersifat menyajikan menu–menu pilihan.

## Tujuan

Buku panduan ini menyajikan penjelasan mengenai SDGs, peranan pemerintah daerah, pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan MDGs, serta upaya–upaya yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan SDGs untuk kurun 2015–2030.

Secara khusus, buku panduan ini bertujuan:

1. Menyediakan informasi kunci, meski serba–singkat, tentang SDGs dan mengapa peranan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan SDGs;

2. Menyediakan pilihan dan contoh-contoh kebijakan dan program yang dapat diadopsi dengan melihat keragaman dan tingkat kemajuan atau tantangan pembangunan di tiap-tiap daerah; serta
3. Menyediakan contoh-contoh praktis yang dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya di daerah.

## Cakupan

Panduan ini disusun dengan cakupan sebagai berikut:

(a) **Informasi** – dengan tujuan pembaca lebih mengenal proses dan isi SDGs, termasuk penting di dalamnya adalah perbedaannya dengan MDGs. Penjelasan atas informasi berupaya menampilkan pokok-pokok yang terpenting.

(b) **Inspirasi** – dengan tujuan pembaca dapat mengetahui inisiatif, program, dan pendekatan menarik yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk itu, para penyusun telah melakukan kajian untuk dapat menampilkan pengalaman nyata yang berhasil, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(c) **Bagaimana**–bagian ini ditujukan agar pembaca dapat mengetahui tahapan dan proses untuk dapat memulai kerja besar melaksanakan SDGs di daerahnya. Pada bagian ini ditekankan perlunya proses serta cara kerja yang terbuka dan partisipatif.

## Proses penyusunan

Proses penyusunan Panduan ini telah berjalan selama lebih dari enam bulan sejak Mei hingga November 2015. Dimulai dari penyusunan *outline*, pengumpulan bahan hingga penulisan draf awal.

Pada tahap awal, sebuah draf disusun oleh Dr. Sutoro Eko. Kemudian dilanjutkan oleh satu tim yang dipimpin oleh Mickael B. Hoelman.

Kerangka konsep penyusunan dipandu oleh tiga pertanyaan utama, yaitu; (i) Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah; (ii) Pengalaman apa saja yang inovatif yang dapat menjadi inspirasi; (iii) Bagaimana pemerintah daerah dapat memulai perencanaan dan pelaksanaan SDGs secara lebih partisipatif.

# MDGS AND SDGS: GLOBAL GOALS FOR THE NEXT 15 YEARS



## BAB 2

# INFORMASI

### Tentang SDGs

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia.

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang **disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali**.

SDGs berisi **17 Tujuan**. Salah satu Tujuan adalah Tujuan yang mengatur tata cara dan prosedur yaitu masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi-pihak.



Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Proses perumusan SDGs **berbeda sekali** dengan MDGs. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, salah satunya melalui survei *Myworld* (boks 1). Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”.

SDGs juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar-negara dan antar-warga negara. SDGs berlaku untuk semua (universal) negara-negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, dan negara berkembang (lihat Boks 2, Perbedaan MDGs dan SDGs).

### **Boks 1: SDGs dan Partisipasi**

**SDGs** dibangun secara partisipatif. PBB bekerja sama dengan beberapa lembaga mitranya telah menyelenggarakan survei warga, yang disebut sebagai *Myworld Survey* (<http://data.myworld2015.org/>).

Hasil survei hingga November tanggal 21 pukul 11.34 telah mengumpulkan sebanyak 8,5 juta lebih suara (persisnya 8.583.717 untuk semua negara). Untuk seluruh dunia, empat prioritas menjadi usulan yaitu pendidikan yang bermutu, kesehatan yang lebih baik, kesempatan kerja lebih baik, dan tata pemerintahan yang jujur dan tanggap.

Untuk Indonesia, telah terkumpul 38 ribu suara (persisnya 38.422 suara), dengan prioritas yang sedikit berbeda dengan prioritas global yaitu; pendidikan yang bermutu, kesehatan yang baik, tata pemerintahan yang jujur dan tanggap, serta kesempatan kerja yang lebih baik.

Survei mengajak warga untuk memilih enam di antara 16 keadaan yang lebih baik untuk masa depan. Meksiko menjadi negara yang paling banyak menyumbang suara, dengan jumlah lebih dari 1,6 juta suara.

Survei ini diadakan sejak 2013 hingga 2015, untuk menjadi masukan bagi Sekjen PBB dan para pemimpin dunia yang merumuskan dan mengesahkan SDGs pada September 2015.

## Boks 2: Perbedaan antara MDGs dan SDGs

MDGs–2000–2015	SDGs–2015–2030
<p><b>50 persen</b> Target dan sasarannya adalah separuh: mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal. Banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya</p>	<p><b>100 persen</b> Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya dan tuntas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengakhiri kemiskinan</li> <li>• 100 persen penduduk memiliki akta kelahiran</li> <li>• memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh.</li> </ul>
<p><b>Dari negara maju, untuk negara berkembang</b> MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu negara maju mendukung dengan penyediaan dana.</p>	<p><b>Berlaku universal</b> SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.</p>
<p><b>Dari Atas (top down)</b> Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elite PBB dan OECD, di New York, tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei warga.</p>	<p><b>Dari Bawah (bottom up) dan partisipatif</b> Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama, dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga.</p>
<p><b>Solusi parsial atau tambal sulam</b> 8 Tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan</p>	<p><b>Solusi yang menyeluruh</b> Beresi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesetaraan gender</li> <li>• Tata pemerintahan</li> <li>• Perubahan model konsumsi dan produksi</li> <li>• Perubahan sistem perpajakan</li> <li>• Diakuinya masalah ketimpangan</li> <li>• Diakuinya masalah perkotaan</li> </ul>

Sumber: Diadaptasi dari Dr. John Coonrod, dalam Kern Beare, [www.feelgood.org](http://www.feelgood.org). Jan, 2015.

## SDGs dan Nawacita

Indonesia telah memiliki prioritas pembangunan, sesuai dengan program dan prioritas dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019. Terdapat konvergensi dan divergensi antara SDGs dan Nawacita.

Dalam hal pembangunan manusia dan upaya penurunan ketimpangan, kedua dokumen selaras berjalan. Dalam hal pembangunan ekonomi, keduanya juga teman seiring. Namun, dalam hal keberlanjutan, ekologi dan konservasi lingkungan hidup, maka Nawacita dan RPJMN harus melakukan banyak penyesuaian (konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, penurunan kerusakan hutan, manajemen air, laut, dan sebagainya).

Meski begitu, secara keseluruhan banyak pihak sepakat bahwa terdapat beberapa fokus SDGs yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita) di antaranya:

1. Keberlanjutan agenda **pembangunan manusia** seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis.
2. Peningkatan **kesejahteraan dan pendidikan** sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria.
3. Pembangunan **ekonomi berkelanjutan** merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
4. Akses **energi** yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.

**5. Perubahan iklim**, di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca melalui Perpres No. 61/ 2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi. Pelaksanaan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.

Keselarasan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla “Nawacita” diharapkan dapat *mengakselerasi* pencapaian RPJMN 2014–2019 sekaligus melengkapi prioritas strategi pembangunan terutama terkait dengan tujuan–tujuan yang berkaitan dengan **lingkungan, energi bersih serta upaya menangani perubahan iklim.**



Gambar 2. Keselarasan Nawacita dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  
 Sumber: Yanuar Nugroho, Presentasi di Konferensi INFID, Jakarta, 6 Oktober, 2015

## SDGs dan Pemerintah Daerah

Proses perumusan SDGs tidak lepas dari aspirasi dan inspirasi dari pemerintah daerah. Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, pemerintah daerah telah sangat aktif ikut andil dalam perumusan dan pengesahan SDGs.

Maka, bagi pemerintah daerah, “SDGs adalah kita”. Sangat wajar dan layak bila peran kota dan kabupaten menjadi sangat sangat penting. Ada sejumlah fakta dan alasan mengapa demikian:

**Pertama**, selama periode penyusunan dokumen SDGs (2014–2015), pemerintah daerah dan kota telah memainkan peranan sangat aktif. Salah satunya, membentuk Gugus Tugas untuk SDGs dan Habitat III [*Global Taskforce of Local and Regional Governments for Post-2015 Agenda towards Habitat III (GTF)*]. Gugus tugas ini secara aktif melakukan advokasi selama masa penyusunan dokumen SDGs. Gugus tugas ini terdiri dari berbagai organisasi dan asosiasi kota serta kepala daerah, di antaranya International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), The Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD), and United Cities and Local Governments (UCLG).

**Kedua**, salah satu keberhasilan pemerintah daerah adalah lahirnya Tujuan Nomor 11 tentang Perkotaan dan Hunian Warga yang Inklusif, Aman, Tangguh terhadap Bencana dan Berkelanjutan (UCLG, 2015).

**Ketiga**, Paragraph Nomor 45 dalam dokumen SDGs menyatakan bahwa negara-negara anggota PBB yang mengadopsi dokumen SDGs “akan bekerja sama erat dengan otoritas regional dan pemerintah daerah” (“*work closely on implementation with regional and local authorities*”). Hal ini merupakan penanda yang sangat jelas tentang peranan penting pemerintah kota dan kabupaten dalam mewujudkan SDGs di seluruh dunia.

**Keempat**, Gugus Tugas Pemerintah Daerah (GTF) dalam proses SDGs juga telah

mengajukan berbagai usulan substansial yang penting, yang akhirnya masuk menjadi Tujuan dan Sasaran dalam dokumen SDGs, di antaranya:

- **Goal 3. Kesehatan untuk semua lapisan usia**, dengan usulan indikator antara lain (i) tingkat kematian penduduk akibat penyakit dan kecelakaan per 100 ribu penduduk; (ii) tingkat polusi.
- **Goal 5. Kesetaraan gender**, dengan indikator (i) keterwakilan politik perempuan yaitu proporsi kursi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat nasional dan daerah, serta (ii) proporsi perempuan dalam posisi manajer di pemerintah nasional dan daerah.
- **Goal 6. Ketersediaan air dan sanitasi**, dengan indikator (i) proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); (ii) pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional.
- **Goal 9. Pembangunan infrastruktur**, dengan beberapa usulan indikator di antaranya proporsi penduduk yang berlangganan internet/*broadband* di antara 100 ribu penduduk (artinya, akses yang lebih luas dan terjangkau bagi semua penduduk terhadap internet).
- **Goal 10. Penurunan ketimpangan** dalam negara dan antar-negara dengan menerapkan indikator Rasio Palma, yaitu perbedaan antara lapisan pendapatan tertinggi 10 persen dan lapisan pendapatan termiskin 10 persen (bukan hanya Rasio Gini, yang terbukti kurang sensitif dalam memetakan ketimpangan pendapatan antara kelompok pendapatan teratas dan terbawah).
- **Goal 16. Masyarakat inklusif**, pemerintah daerah mengajukan usulan agar pemerintah di semua tingkatan termasuk pemerintah daerah membuka seluruh informasi mengenai anggaran pemerintah.

Sumber: Local Authorities Major Group 's (LAMG). Position paper, 2015.

Pada sisi positif dan dalam konteks Indonesia, SDGs dapat menjadi momentum dan aset positif bagi kepala daerah dan birokrasi daerah, jika berhasil melaksanakan dan meraih tujuan dan target SDGs selama 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun ke depan.

- **Pertama**, reputasi baik. SDGs dapat menjadi fokus keberhasilan. Keberhasilan memimpin suatu daerah, dalam hal ini keberhasilan melaksanakan berbagai tujuan dan target SDGs melalui berbagai ukuran kinerja yang baik akan segera disorot oleh warga dan pendapat umum termasuk media massa dan media sosial.
- **Kedua**, parpol dan publik selalu mencari para pemimpin daerah untuk didukung dan diusulkan memimpin jabatan publik di tingkat yang lebih tinggi. Salah satu sumber utama mereka adalah para pemimpin daerah yang terbukti memiliki reputasi baik. Ideologi, keanggotaan partai politik dan afiliasi kini menjadi cair karena parpol kekurangan calon pemimpin yang terbukti berpengalaman dari internal mereka.
- **Ketiga**, Indonesia dan pengalaman di banyak negara memperlihatkan bahwa daerah yang berhasil merupakan sumber bagi kepemimpinan di tingkat nasional. Pelaksanaan dan keberhasilan SDGs di daerahnya akan menjadi salah satu ukuran penting bagi karir politik atas dasar prestasi, kinerja, dan kepemimpinan yang unggul.

**Tantangan dan kendala.** Meski demikian, pelaksanaan SDGs di kota dan kabupaten di Indonesia akan berhadapan dengan berbagai tantangan jika mengacu kepada pengalaman 15 tahun otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Berbagai kendala menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan perbaikan dan perombakan dalam pelaksanaan dan perwujudan SDGs di daerahnya, beberapa di antaranya;

- **Veto politik.** Para pemimpin kota dan kabupaten di Indonesia terdiri dari beragam partai politik atau koalisi partai politik. Tidak semua kepala daerah (bupati dan wali kota) akan serta merta sejalan dengan prioritas presiden terpilih. Hal ini akan menjadi kendala politik, misalnya, maukah kepala daerah menyatukan diri dengan prioritas dan target pemerintah pusat?
- **Turn over politik dan organisasi.** Di samping pergantian kepala daerah, manajemen dan birokrasi kota dan kabupaten di Indonesia juga kerap mengalami pergantian personalia, yang dapat mengganggu keberlanjutan rencana serta prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.
- **Kapasitas birokrasi.** Belum semua 514 kabupaten dan kota memiliki kapasitas perencanaan dan penganggaran yang merata dan baik. Karena itu, dukungan dari pemerintah nasional dan para pemangku kepentingan lainnya akan sangat menentukan misalnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan memperluas akses warga atas air bersih dan air minum. Menata kota yang baik karenanya akan memerlukan para pemimpin yang berkomitmen, bekerja keras serta didukung oleh para kepala dinas dan tata kerja birokrasi yang cekatan dan efektif.

## MDGs dan Hal–Hal yang Belum Selesai

Salah satu indikator kesiapan Indonesia adalah kapan dan bagaimana pemerintah kabupaten dan kota akan melaksanakan SDGs.

Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pemerintah provinsi. Dengan rencana aksi tersebut, pemerintah provinsi akan dapat berperan aktif dan pada gilirannya, diharapkan mempercepat pencapaian target–target MDGs pada tahun 2015.

MDGs dimulai tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Artinya, upaya membawa MDGs ke tingkat lokal melalui RAD oleh pemerintah nasional sesungguhnya berjalan terlambat selama 10 tahun.

Meski terlambat, upaya tersebut patut diapresiasi dan menjadi bahan pembelajaran bersama. Salah satunya adalah pengakuan bahwa peranan pemerintah daerah ternyata sangatlah penting.

Hingga akhir tahun 2015, Indonesia berpeluang gagal mencapai sasaran-sasaran MDGs. Bahkan beberapa provinsi di Jawa saja masih memiliki tugas yang berat seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (lihat Boks 3).

Target-target yang berpeluang gagal untuk dicapai itu di antaranya;

- Penurunan angka kematian ibu
- Penurunan angka kematian balita
- Penurunan angka AIDS/HIV
- Cakupan air minum dan sanitasi

SDGs tidak lain merupakan kelanjutan dari target-target MDGs dalam hal bagaimana mewujudkan pembangunan manusia. Keempat sasaran yang belum selesai itu tidak dapat **dilupakan** dan **diabaikan** begitu saja, karena sasaran-sasaran tersebut juga termuat ke dalam beberapa Tujuan dan Sasaran SDGs.

- **Goal** Nomor 2: Mengakhiri kelaparan, termasuk di dalamnya mengatasi gizi buruk.
- **Goal** Nomor 3: Kesehatan untuk semua lapisan penduduk (usia).
- **Goal** Nomor 6: Ketersediaan air bersih dan sanitasi.

### Boks 3: Tingginya Angka Kematian Ibu

#### Angka Kematian Ibu Tertinggi ada di Jawa Barat

Jumat, 5 Desember 2014 | 07:40 WIB

**SUKABUMI, KOMPAS.com** – Upaya pemerintah untuk menurunkan jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) tampaknya masih sulit dilakukan. Padahal, menurut target pembangunan milenium (MDGs), jumlah kematian ibu harus mencapai 102 per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan Laporan Rutin Program Kesehatan Ibu Tahun 2013 yang diterima dari Dinas Kesehatan Provinsi tercatat Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah AKI. Dalam laporan tersebut, sekitar 765 kasus kematian ibu terjadi di Jawa Barat dari total 5.019 kasus. Dari angka tersebut, Jawa Barat menjadi penyumbang 50 persen jumlah kematian ibu.

“Jawa Barat termasuk penyumbang angka kematian ibu nomor satu. Dan Kabupaten Sukabumi menjadi daerah yang paling tinggi AKI-nya di Jawa Barat. Indonesia pun bisa dibilang tertinggi AKI-nya di kawasan Asia Tenggara,” ujar dr. Lily S. Sulistyowati, Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam acara sarasehan SEHATi Bicara Keluarga Sehat di Hotel Lido, Sukabumi pada Kamis (04/12/14).

Lily menambahkan, selain Jawa Barat, ada pula beberapa daerah lainnya yang juga menyumbang setengah kematian ibu. Daerah tersebut adalah Jawa Tengah dengan 668 kasus, Jawa Timur 642 kasus, Sumatera Utara dengan 249 kasus dan Banten dengan 216 kasus. Untuk sisanya beberapa daerah menyumbang 25 persen dan kurang dari 25 persen jumlah kematian ibu.

Dr. Albani Nasution, selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi membenarkan bahwa jumlah kematian ibu di Sukabumi pada 2013 mencapai 78 kasus. Angka ini meningkat dari sebelumnya di 2007 dengan 49 kasus berdasarkan data dinas kesehatan di kabupaten tersebut.

“Sukabumi merupakan kabupaten terluas se-Jawa-Bali dengan 48 kecamatan, 59 puskesmas dan sekitar 2.400.000 penduduk golongan menengah ke bawah. Walaupun bantuan iuran cukup besar, permasalahan mengenai kesehatan khususnya AKI juga sangat besar,” kata Albani.

Berbagai penyebab jumlah kematian ibu yang tinggi tak hanya pendarahan yang dialami saat persalinan, namun ada berbagai penyebab lainnya. Seperti infeksi sebanyak 22 persen, hipertensi 14 persen, dan lain-lain 27 persen. Jumlah kelahiran pada ibu berumur di bawah 20 tahun juga cukup tinggi yaitu 47 persen.

Lily menganggap bahwa masih tingginya jumlah kematian ibu di Indonesia merupakan masalah bersama sehingga membutuhkan upaya yang beriringan juga.

“Masalah AKI ini sudah cukup dipahami oleh masyarakat. Data Riskesdas 2013 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam tatanan rumah tangga menunjukkan hasil bahwa persalinan oleh tenaga kesehatan tinggi, yaitu 87,6 namun angka kematian pun juga tinggi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi. Itulah yang harus kita perhatikan,” ungkapnya. (Eva Erviana)

## Boks 4: Angka Kematian Ibu Tinggi

### Angka Kematian Ibu Tinggi, Ganjar Mengaku Galau

Kamis, 11 Juni 2015 | 14:27 WIB

**SUKOHARJO, KOMPAS.com** – Gubernur Jawa Tengah mengaku galau dengan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Tengah yang terbilang tinggi. Dia berjanji akan terus berusaha agar angka kematian ibu dan anak bisa berkurang.

Pada tiga bulan 2015 saja, sudah ada 115 kasus AKI dan AKB. Tahun 2014 lalu, ada 711 kasus, dan tahun 2013 sebanyak 675 kasus.

“Jujur, saya ini galau. Pingin *matur* (bilang) ke ibu-ibu bidan, kenapa ya angka kematian ibu meningkat. Itu kenapa penyebabnya?,” kata Ganjar dalam forum Ngopi bareng Bidan dan Camat di Kabupaten Sukoharjo, Kamis (11/6/2015).

Ganjar mengatakan, berdasarkan data yang diperolehnya, tiap kelahiran 100.000 bayi pasti ada kejadian lima kali ibu meninggal. Pada tahun 2013 misalnya, angka meninggal karena pendarahan sebanyak 19 persen dan infeksi tiga persen. Dilihat dari waktu meninggal, 25 persen ibu meninggal dalam keadaan hamil, kemudian bersalin dan 58 persen saat nifas.

Tahun 2014, angka kematian meningkat. Saat pendarahan, ibu meninggal tercatat 23 persen, 4 persen karena infeksi, sedangkan saat hamil 27 persen dan bersalin 17 persen.

“Saya malu kalau tidak bisa menyelamatkan generasi sejak di kandungan,” paparnya.

Ganjar menambahkan, semestinya angka kematian ibu ataupun anak bisa ditekan. Pasalnya, ibu melahirkan sudah tidak lagi ke dukun bayi, melainkan ke bidan puskesmas. Untuk itu, Ganjar minta bidan serius menihilkan angka kematian.

“Kalau bisa tugas Anda sebagai bidan dinolkan angka kematian. Saya ingin ada program *nginceng wong meteng* (memperhatikan ibu hamil) agar nol kematian,» paparnya.

Salah satu bidan Sukohajo, Hariyani, mengatakan, ibu meninggal lebih banyak terjadi dalam kondisi nifas. Biasanya, tiga hari selepas melahirkan ibu meninggal karena tekanan tensinya yang relatif tinggi.

“Sebelum ibu melahirkan, tensi tinggi biasanya menginjak usia 8–9 bulan. Ketika itu, kami sudah sarankan agar ibu bisa dirawat di rumah sakit,” tambahnya.

Secara umum, angka kematian untuk ibu di eks Karesidenan Pekalongan 32 kasus, eks Karesidenan Semarang 28 kasus, eks Karasidenan Surakarta 15 kasus, eks karesidenan Banyumas 15 kasus, eks karesidenan Kedu 8 kasus dan eks karesidenan Pati 17 kasus. Total, dalam tiga tahun pertama 2015 sudah ada 115 kasus kematian ibu dan anak.

Berdasarkan data kewilayahan, daerah paling banyak yang membuat ibu meninggal antara lain Tegal 11 kasus, Grobogan 9 kasus, Banyumas 7 kasus, Brebes, Kendal, dan Pati 6 kasus.

Selain itu, Kabupaten Pekalongan 5 kasus, dan nol kasus di Rembang dan Temanggung. Sementara kematian anak tercatat sudah 1.271 yang tersebar di berbagai daerah. Dilihat dari wilayah, Kabupaten

Grobogan menyumbang 104 kasus kematian anak, disusul Cilacap 74 kasus, Brebes 64 kasus, Banyumas 61 kasus, Banjarnegara 59 kasus, dan Kota Surakarta hanya ada satu kematian bayi.

### Boks 5: Kematian Ibu Masih Tertinggi

#### Kematian Ibu Masih Tertinggi di Surabaya

Ahad, 25 Oktober 2015, 17:46 WIB

**REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA** — Angka kematian ibu karena melahirkan di Surabaya tercatat masih yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Pada 2014, angka kematian ibu di Surabaya mencapai 39 kasus. Sementara itu, tahun 2015, hingga September, tercatat 32 ibu meninggal dunia karena proses persalinan.

Pemerintah Kota Surabaya bukan tidak berupaya mengatasi hal tersebut. Meskipun masih yang tertinggi, jumlah angka kematian ibu mengalami penurunan. Tahun 2013, angka kematian ibu di Surabaya pernah mencapai 60 kasus.

Tingginya kasus kematian ibu saat melahirkan mendapatkan perhatian serius para pemangku kebijakan. Merespons kondisi tersebut, Universitas Airlangga (Unair), bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Jatim, Dinas Kesehatan Surabaya, dengan didukung Unicef, memprakarsai program Gerakan Peduli Ibu Hamil dan Anak Sehat (Geliat) Unair.

Penanggung jawab program Geliat Unair, Nyoman Anita Damayanti, menjelaskan, Geliat Unair merupakan konsep gotong royong

berbagai unsur dalam upaya menekan angka kematian ibu dan bayi. Menurut Nyoman, dalam program tersebut, Unair mengundang para sukarelawan dari kalangan mahasiswa untuk menjadi agen–agen pendamping ibu hamil.

“Kami menjalankan program ini mencakup enam puskesmas di empat kecamatan. Dengan catatan positif yang kami dapat, program ini tidak menutup kemungkinan akan diperluas,” ujar Nyoman dalam jumpa pers peluncuran program Geliat Unair di Kampus Unair, Ahad (25/10).

Dalam program tersebut, kata dia, sebanyak 200 relawan mahasiswa dari mulai jenjang D–3 hingga S–3 menjadi pendamping dan konsultan dari para ibu hamil. Informasi dan masukan dari para relawan tersebut, menurut Nyoman, selanjutnya menjadi masukan bagi tenaga medis di puskesmas–puskesmas mitra.

Salah seorang sukarelawan, Dina, mengaku antusias mengikuti program tersebut. Ia bercerita, sejak Juli lalu, ia ikut mendampingi dua orang ibu hamil di Kecamatan Kali Rungkut. “Jadi tiap bulan kita datang ke rumah ibu hamil, kita tanya–tanya bagaimana kondisi mereka, kalau ada keluhan kita konsultasikan melalui grup, nanti senior–senior yang ahli memberi masukan, terus informasinya kita teruskan ke puskesmas,” kata mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat tersebut.

# The road to ending hunger

5. **2030**

**Hunger is ended**

and everyone has access to sufficient nutritious food all year round



4. End **all** forms of malnutrition

and address the

nutritional needs of women, and all vulnerable people



Ensure agriculture & food systems

are **productive and sustainable**

3. in particular, resilient to climate change and extreme weather such as drought, flooding and other disasters



1. **Invest** to improve rural infrastructure

and agricultural production in the poorest and least developed countries



2. **Double productivity and income of small holder farmers**

including women farmers, protecting their land and improving their access to markets

## BAB 3

# INSPIRASI

### **Kabupaten Kulon Progo, DIY – Upaya Lokal Mengentaskan Kemiskinan**

**Tujuan terkait SDGs: SDGs #1; SDGs #3; SDGs #10**

Tidak ada yang menyangka jika sebuah kabupaten kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Kabupaten Kulon Progo, berani memulai terobosan besar untuk mengentaskan kemiskinan. Meski miskin anggaran, kabupaten ini bertekad untuk kaya akan inovasi. Sejak pertama dilantik pada tahun 2012, Bupati Kulon Progo, dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) telah berambisi untuk melakukan sederet gebrakan ambisius untuk kesejahteraan warganya.

Di awal pemerintahannya, Bupati Hasto Wardoyo meluncurkan program warung miskin untuk bersaing dengan menjamurnya waralaba modern di pedesaan. Dengan menggandeng Yayasan Damandiri, pemerintah kabupaten mendirikan Toserba Posdaya yang menyuplai pasokan barang di warung miskin. Warung ini merupakan usaha kemitraan 10 kepala keluarga yang terdiri dari empat kepala keluarga (KK) sejahtera dan enam KK kurang sejahtera. Pemerintah kabupaten menggunakan pendataan keluarga miskin setiap tahun yang diinisiasi sejak 2011 sebagai sumber referensi penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah kabupaten juga melibatkan partisipasi pihak swasta melalui program satu desa, satu mitra usaha (*one village, one sister company*) di mana program-program tanggung jawab sosial perusahaan ditujukan untuk mendampingi keluarga miskin. Hampir seluruh desa kini telah mendapatkan pendampingan dari perusahaan lokal ataupun nasional.

Satu tahun berikutnya, Bupati Kulon Progo meluncurkan gerakan “Bela dan Beli Kulon Progo”. Gerakan ini bertujuan mendorong semangat warga dan pemerintah daerah untuk mengutamakan membeli produknya sendiri guna menumbuhkan perekonomian lokal. Gerakan ini mengimbau masyarakat Kulon Progo untuk mengonsumsi beras lokal agar menguntungkan para petani Kulon Progo. Pemerintah kabupaten turut meluncurkan air minum dalam kemasan bernama AirKU yang sumber airnya diambil dari mata air daerah Kulon Progo dan diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun. Saat ini, gerakan ini telah meluas hingga ke produksi batik geblek renteng, gula semut, tas, hingga olahan makanan modern. Pemerintah kabupaten juga memanfaatkan program dana bantuan sosial Rp 1 juta per Rumah Tangga Miskin dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pengentasan kemiskinan lokal yang ditujukan untuk merangsang semangat wirausaha dan kegiatan ekonomi produktif.

Untuk mempercepat upaya pengurangan kemiskinan, Bupati Kulon Progo juga menerbitkan SK Bupati No.1/2015 tentang Peran Aparatur Daerah sebagai Pendamping Keluarga Miskin. Pendampingan ini meliputi upaya mengatasi masalah pangan, papan, kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, kesempatan kerja dan disabilitas.

Di bidang kesehatan, pemerintah kabupaten menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanpa Kelas, mengubah puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tanpa Kartu. Setiap bayi lahir pun kini bisa langsung ditanggung Jamkesda jika telah tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK). Pemerintah kabupaten juga menolak iklan rokok untuk mendukung Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Semua terobosan tersebut kini mulai dirasakan hasilnya oleh masyarakat Kulon Progo. Selama dua tahun berturut-turut angka kemiskinan di Kulon Progo menurun dari 23,32 persen (2012) menjadi 21,39 persen (2013) dan 19,02 persen

(2014) dengan rasio gini yang turut menurun dari 0,34 (2012) menjadi 0,29 (2013). Meski masih tergolong tinggi, pemerintah kabupaten Kulon Progo terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan rata-rata dua persen setiap tahun. Capaian ini melampaui rata-rata upaya penurunan kemiskinan di tingkat nasional. Keberhasilan tersebut telah menarik upaya belajar dari kabupaten lain, salah satunya dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang baru saja berkunjung langsung ke Kabupaten Kulon Progo.

## **Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan – Memerangi Angka Kematian Ibu (AKI)**

### **Tujuan terkait SDGs: SDGs #3; SDGs #5**

Pada tahun 2006, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terburuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Di kabupaten ini, rasio kematian ibu masih sangat tinggi, yaitu sebesar 300 per 100.000 kelahiran hidup. Salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) diduga akibat proses persalinan tradisional yang hanya ditolong oleh dukun bayi atau dukun beranak yang tidak terlatih.

Untuk memecahkan masalah ini, pemerintah kabupaten menginisiasi program Kemitraan Bidan dan Dukun (KBD) pada tahun 2007. Program ini secara umum berupaya mengalihfungsikan peranan dukun bayi atau dukun beranak (*sanro*) dalam persalinan tradisional kepada perawatan bayi dan ibu pasca-melahirkan. Selain dilatih, mereka diajak untuk mendorong setiap ibu melahirkan agar dapat ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih seperti bidan. Setiap dukun bayi mendapatkan insentif Rp 50.000 manakala merujuk upaya persalinan ini ke bidan desa.

Program KBD sesungguhnya juga banyak dilakukan di berbagai daerah lain di

Indonesia, namun pemerintah Kabupaten Takalar mampu mencetak kesuksesan karena melakukan pendekatan kultural yang spesifik. Pendekatan kultural kepada para dukun yang umumnya menempati posisi “dituakan” dan berperan secara spiritual telah membuat mereka tidak merasa disingkirkan. Sebaliknya, justru mereka dihargai dan dimanusiakan.

Tiga tahun kemudian, program KBD diperkuat melalui payung hukum Peraturan Daerah No.2/2010. Jaminan hukum melalui peraturan daerah, secara perlahan ikut mendorong bidan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sementara itu, dukun tetap tidak kehilangan pekerjaan, bahkan mendapatkan tambahan penghasilan. Pemerintah kabupaten juga mengajak para pihak pemangku kepentingan untuk terlibat langsung di dalam program ini. Dukungan dari berbagai tingkatan dan kelompok masyarakat, termasuk parlemen daerah, telah membuat implementasi kebijakan ini berjalan efektif.

Pada tahun 2012, porsi anggaran Dinas Kesehatan pada APBD mencapai lima persen dari total APBD. Meski belum mencapai angka 10 persen, jumlah ini masih lebih tinggi ketimbang persentase anggaran di tingkat nasional yang rata-rata baru mencapai tiga persen. Sebagai hasilnya, indikator-indikator seperti K1 (kunjungan antenatal trimester pertama) naik lima kali lipat, dari 23 persen (2006) menjadi 105 persen (2012), K4 (kunjungan antenatal trimester keempat) naik dari 25,37 persen (2006) menjadi 97 persen (2012) dan persalinan ditolong tenaga kesehatan meningkat menjadi 96,4 persen pada tahun 2011.

Upaya tersebut juga telah membuat angka kematian ibu di Takalar menurun hingga 0 pada kurun waktu 2009–2010. Pada tahun 2012, di Kabupaten Takalar tidak ditemui lagi insiden kematian ibu. Keberhasilan Takalar menunjukkan bahwa pemerintah daerah terbukti mampu mengakselerasi upaya penurunan angka kematian ibu secara drastis di Indonesia. Keberhasilan ini jugalah yang mendorong Kementerian Kesehatan menetapkan Kabupaten Takalar sebagai salah satu daerah percontohan dan tempat belajar program Komunitas Belajar Desa (KBD) di Indonesia.

## **Provinsi DKI Jakarta – Kartu untuk Sehat**

### **Tujuan terkait SDGs: SDGs #3; SDGs #5**

Kesehatan merupakan faktor penting yang dapat dijadikan salah satu parameter kesejahteraan masyarakat perkotaan. Sejatinya, setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan. Ketika warga miskin membutuhkannya, di sinilah peran pemerintah dibutuhkan. Menurut data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta mencapai 1,2 juta jiwa, dan diperkirakan sebanyak 3,5 juta lainnya masuk ke dalam kelompok rentan. Kartu Jakarta Sehat (KJS) merupakan salah satu gebrakan awal di bidang kesehatan yang dilakukan oleh pasangan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama setelah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Dalam pelaksanaannya, KJS menyasar 4,7 juta warga miskin dan rentan yang berdomisili di Jakarta.

KJS merupakan salah satu program jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah provinsi melalui Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta bagi warganya dalam bentuk bantuan pengobatan. Program ini menyediakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi setiap penduduk keluarga miskin dan kurang mampu di Jakarta serta belum memiliki jaminan kesehatan melalui sistem rujukan berjenjang. Pada awal peluncurannya pada tahun 2013, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran Rp 1,55 triliun dari total APBD Rp 49,98 triliun untuk program KJS. Pemerintah provinsi menjalin kerja sama dengan berbagai rumah sakit di Jakarta, baik rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta. Hingga Januari 2015, sebanyak 92 rumah sakit telah melayani KJS. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya.

Sejak diluncurkan pertama kali, KJS diapresiasi oleh warga Jakarta meski mendapatkan tantangan kesiapan kelembagaan, ketersediaan anggaran,

serta kesiapan aparaturnya pelaksana. Euforia masyarakat untuk berobat tidak sebanding dengan kapasitas sarana medis yang ada. Di beberapa tempat, KJS bahkan sempat membengkakkan anggaran fasilitas kesehatan. Meski begitu, seiring dengan penataan terus-menerus, dalam perkembangannya, KJS turut menghasilkan berbagai perbaikan. Selain penataan sistem dan kelembagaan, KJS juga memanfaatkan teknologi telekomunikasi melalui penyediaan layanan Call Center 119. Layanan bebas pulsa ini diperuntukkan bagi setiap warga Jakarta yang ingin mendapatkan informasi ketersediaan ruang perawatan rumah sakit yang dapat digunakan pada saat keadaan darurat. Program ini selanjutnya diadopsi ke tingkat nasional sebagai Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh Presiden Jokowi. Adopsi tersebut telah memungkinkan perluasan cakupan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dari skala provinsi menjadi nasional.

## **Kota Surabaya, Jawa Timur – Mengelola Sampah Kota**

### **Tujuan terkait SDGs: SDGs #6; SDGs #11**

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya menghadapi berbagai masalah lingkungan akibat tingginya laju urbanisasi, di antaranya menyangkut sampah kota. Tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) telah mengakibatkan tingginya volume sampah setiap tahun. Selain itu, sistem drainase yang buruk turut menimbulkan masalah baru, yaitu banjir tahunan. Tak heran, jika tingkat kematian akibat penyakit diare dan demam berdarah dengue (DBD) masih cukup tinggi di kota ini.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah kota berusaha mengubah paradigma pembangunan perkotaan melalui revitalisasi program-program pro-lingkungan hidup. Pemerintah menggalakkan program pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kedua program ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat. Pemerintah membuka kesempatan bagi

warganya untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Pemerintah kota melakukan pembinaan terhadap setiap rumah tangga untuk melakukan pemilahan sampah, pengolahan daur ulang, pendidikan serta pemanfaatan sampah secara ekonomis.

Dengan menggandeng beberapa lembaga swadaya masyarakat, dimulai tahun 2004, pemerintah kota memperkenalkan teknologi tepat guna bagi rumah tangga, seperti Kotak Takakura sebagai solusi ketiadaan lahan pengomposan sampah. Lima tahun berikutnya, untuk mendukung program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pemerintah kota meluncurkan bank sampah yang menerima, mengolah, dan menjual sampah masyarakat. Setiap sampah yang telah dipilah lantas ditimbang untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Pemerintah memberikan buku tabungan bagi setiap warga yang menukarkan sampahnya kepada pemerintah kota. Awalnya, program ini didukung oleh perusahaan swasta yang mendirikan 10 pusat komunitas di beberapa kelurahan. Untuk seterusnya, program ini berkembang ke lingkungan rukun warga (RW) hingga bank-bank sampah perseorangan.

Pemerintah kota juga menyediakan 24 Rumah Kompos berskala menengah di beberapa titik di Kota Surabaya yang sebagian juga dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Dalam satu hari, rata-rata 1.100 ton sampah terkumpul yang 60 persen diantaranya merupakan sampah organik. Upaya ini mampu mengurangi volume rata-rata sampah kota di TPA hingga setengah ton per bulan. Di Rumah Kompos, sampah tersebut selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos untuk digunakan kembali di seluruh taman di Surabaya, penghijauan kampung, dan kegiatan-kegiatan warga.

Pada tahun 2009, pemerintah kota mengalokasikan Rp 84 miliar dari APBD Kota Surabaya untuk program pengelolaan sampah ini. Hasilnya, dalam kurun 2005–2011, pemerintah kota mampu menurunkan volume sampah hingga 37 persen dan memberi pendapatan rata-rata bank sampah hingga Rp 19 juta per

bulan. Angka ini sangat berarti besar terhadap upaya menekan laju pertumbuhan sampah seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Melalui program bank sampah, pemerintah kota telah mengedukasi warganya mengenai daur ulang 3R (*reduce, reuse, recycle*). Keterlibatan dan kerja sama pemerintah dengan masyarakat telah membuat program ini berkelanjutan dan menjadi milik warga Kota Surabaya.

## **Kota Prabumulih, Sumatera Selatan – Kota Mandiri Hemat Energi**

### **Tujuan terkait SDGs: SDGs #7**

Prabumulih, Sumatera Selatan, tumbuh dari kota pengeboran minyak dan gas bumi. Sejak tahun 1900, cadangan minyak dan gas alam di kota ini telah dieksplorasi oleh perusahaan minyak dan gas Amerika Serikat, Stanvac. Kini, wilayah eksplorasi itu dikelola oleh PT Pertamina. Meski kaya sumber daya alam, Prabumulih tergolong daerah dengan APBD terendah di Sumatera Selatan.

Barulah, dimulai tahun 2009–2010, Kota Prabumulih mulai melakukan terobosan membangun instalasi jaringan gas kota. Pemerintah kota menyisihkan anggaran Rp 3 miliar dari APBD kota untuk menjalankan program gas rumah tangga. Upaya ini dilatarbelakangi oleh krisis energi terutama pada kurun 2007–2008 pada saat pemerintah nasional mulai menarik minyak tanah bersubsidi dan langkanya tabung elpiji. Padahal, Kota Prabumulih merupakan salah satu penghasil gas alam terbesar di negeri ini dengan produksi jutaan kaki kubik per tahun.

Awalnya, pemerintah kota memanfaatkan dana APBN 2008 sekitar Rp 48 miliar untuk mulai memasang jaringan gas bagi 4.650 rumah tangga. Lima tahun kemudian, program ini mulai beroperasi menyediakan sumber energi murah yang dapat langsung dinikmati. Pada tahun 2015, pemerintah kota menambah

instalasi bagi 2.626 rumah tangga baru dengan dana dari PT Pertagas Niaga yang merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina Gas. Seluruh biaya pemasangan yang nilainya mencapai Rp 3,5 juta per rumah tangga dibebaskan oleh pemerintah kota.

Pengelolaan jaringan gas rumah tangga ditangani oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Prabu. Kini sekitar 20 persen rumah tangga di Prabumulih telah terjangkau oleh layanan ini. Untuk meningkatkan pelayanan, pemerintah kota menerapkan teknologi informatika. Setiap rumah tangga dapat menggunakan layanan pesan singkat (SMS) untuk mengetahui jumlah tagihan bulanan mereka dan memanfaatkan jaringan Bank Sumsel Babel untuk melakukan pembayaran secara *online*.

Pemerintah kota berambisi seluruh rumah tangga nantinya dapat menikmati layanan ini. Upaya penggunaan gas alam diharapkan dapat membuat Kota Prabumulih menjadi kota mandiri dan hemat energi.

## **Kabupaten Wonosobo – Harmoni dan Persamaan Perlakuan**

### **Tujuan terkait SDGs: SDGs #10**

Pengusiran terhadap penganut Syiah seperti yang terjadi di Sampang, Jawa Timur, atau terhadap pengikut Ahmadiyah yang terjadi di berbagai daerah setidaknya tidak terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Padahal di Wonosobo, ada 6.000 jiwa anggota jemaah Ahmadiyah, 200 anggota jemaah Alif Rebo Wage (Aboge), dan sekitar 250 penganut Syiah. Pada tahun 2005 kelompok minoritas di Wonosobo sulit memiliki aktivitas dan tidak banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Namun kini, mereka dilibatkan ke dalam banyak kegiatan, termasuk melalui Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Wonosobo yang melibatkan pemuka

agama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahmadiyah, Syiah, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao serta kelompok penghayat kepercayaan Aboge. Forum ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan warga dari berbagai agama dan kepercayaan.

Prinsip menghidupkan harmoni di Wonosobo dilakukan melalui upaya memfasilitasi lintas agama dan keyakinan di Wonosobo, yang merupakan keinginan dari pemimpin daerah di Wonosobo. Sebagai penegakan kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemerintah kabupaten mengembangkan komunikasi harian dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan, termasuk dengan institusi penegak hukum polisi dan tentara.

Pemerintah kabupaten juga menyiapkan peraturan daerah (perda) tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia (HAM). Perda tersebut memiliki ruang lingkup yang mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, rasa aman, hak kelompok rentan, kesetaraan dan hak untuk tidak didiskriminasi, dan lain-lain termasuk hak kebebasan beragama. Perihal kebebasan beragama tertulis: “Semua warga berhak melaksanakan kebebasan agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya; semua warga berhak atas kesetaraan dan hak untuk tidak didiskriminasi atas dasar gender, ras, dan agama”. Rancangan perda ini dibahas bersama kelompok dan pemangku kepentingan di Wonosobo.

Perbedaan itu biasa, bukan untuk dimasalahkan, begitulah yang terjadi di Wonosobo. Potensi keberagaman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah salah satu potensi lokal yang ada sejak dulu dan bila dikelola dengan baik, tentu akan memberikan dampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

## Kota Banda Aceh – Menuju Kota Ramah Gender

### Tujuan terkait SDGs: SDGs #1; SDGs #5; SDGs #10

Selain dikenal sebagai serambi Makkah, sejak 2007 Kota Banda Aceh juga mulai dikenal sebagai Kota Partisipasi Perempuan di Indonesia. Pemerintah kota meluncurkan Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) sebagai suatu mekanisme partisipasi bagi khususnya kaum perempuan dalam perencanaan pembangunan. Gagasan tentang perlunya Musrena dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan rendahnya partisipasi kaum perempuan di Kota Banda Aceh. Hasil evaluasi Musrenbang 2007 di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa tingkat kehadiran perempuan kurang dari 27 persen, bahkan hanya berada di bawah lima persen di tingkat *gampong* (desa).

Minimnya keterlibatan perempuan sering mengakibatkan usulan yang dihasilkan kurang berpihak kepada mereka. Inisiasi Musrena didukung oleh Wakil Wali Kota perempuan pertama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Illiza Sa'aduddin Djamal. Musrena diharapkan juga menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berorganisasi. Tujuan akhir Musrena adalah tersedianya anggaran yang responsif gender.

Persiapan pelaksanaan Musrena dilakukan pada awal Januari di setiap tahunnya, setelah pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan. Musrena dilaksanakan dengan pertemuan tokoh perempuan di tingkat *gampong* untuk menyusun program prioritas dan memilih dua orang wakil mereka di Musrena tingkat kecamatan yang selanjutnya merumuskan usulan prioritas dari setiap *gampong*. Pelaksanaan Musrena di tingkat kecamatan dilakukan sebanyak tiga kali selama dua hari, yang masing-masing pelaksanaannya menggabungkan tiga kecamatan dari total sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh.

Usulan prioritas dipilih berdasarkan kriteria tingkat kebutuhan masyarakat, visi/misi Kota Banda Aceh dan RPJMD serta merupakan tindak lanjut hasil Musrena

tahun sebelumnya. Usulan perempuan didominasi perhatian kepada bidang sosial seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta keamanan lingkungan. Usulan–usulan ini kemudian diserahkan kepada forum integrasi untuk dipadukan dalam Rencana Kerja SKPD. Pemerintah kota membentuk tim pendamping dan monitoring dan evaluasi yang mengikuti proses Musrena dari tingkat *gampong* hingga kota.

Tim monitoring dan evaluasi memastikan keterlibatan minimal 30 persen perempuan di dalam setiap proses serta alokasi anggaran minimal lima persen di setiap SKPD yang ditujukan khusus untuk perempuan dengan tetap menerapkan prinsip anggaran responsif gender. Kontribusi Musrena terlihat dalam mewujudkan anggaran responsif gender baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh. Anggaran yang responsif gender adalah anggaran di mana perempuan dan laki–laki serta kelompok lainnya mendapat akses, peran, kontrol, dan manfaat yang berimbang dalam proses perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan, baik program fisik maupun program nonfisik.

Sebagai sebuah upaya peningkatan partisipasi politik perempuan, Musrena memberikan penyadaran kepada kaum perempuan dan laki–laki tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan. Musrena pula yang telah mengantarkan Kota Banda Aceh menerima penghargaan Gender Awards dari pemerintah Jerman (2008) dan Innovative Government Awards dari Kementerian Dalam Negeri (2012). Di bawah kepemimpinan Illiza Sa’aduddin Djamal, yang kini menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh, Musrena menjadi upaya awal untuk mewujudkan kota ramah gender.

## **Kota Makassar – Bersama Membangun Akuntabilitas Pembangunan**

### **Tujuan terkait SDGs: SDGs #16**

Siapa sangka jika di gerbang timur Indonesia, tepatnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, lahir terobosan audit sosial yang diinisiasi bersama oleh masyarakat dan pemerintah kotanya. Awal pelaksanaan audit sosial di Kota Makassar dimulai tahun 2010 oleh beberapa kelompok komunitas warga dan lembaga swadaya masyarakat.

Audit sosial adalah penilaian program pembangunan oleh masyarakat. Melibatkan masyarakat secara langsung untuk meninjau sejauh mana sebuah kebijakan dianggap dapat menyelesaikan masalah masyarakat secara substansial melalui penilaian terhadap isi cakupan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, persepsi penerima manfaat, hasil yang diharapkan secara faktual, dan dampak sosial atas kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Melalui audit sosial, warga merespons program-program unggulan Pemerintah Kota Makassar yang saat itu ini dipimpin oleh pasangan IASMO. IASMO adalah singkatan dari Ilham Arief Sirajuddin dan Supomo Guntur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2008–2013. Pasangan ini saat berkampanye menyampaikan janji politiknya berupa Paket IASMO Bebas, yakni bebas biaya sejak lahir sampai mati bagi setiap warganya. Paket ini mencakup: bebas biaya persalinan, bebas biaya antar-jenazah dan pemakaman, bebas biaya kesehatan, bebas biaya pendidikan dan angkutan bus sekolah serta bebas pendampingan hukum bagi warga miskin.

Di tahun kedua, audit sosial berlanjut dengan Nota Kesepahaman antara Wali Kota dengan lembaga swadaya masyarakat. Wali Kota Makassar mungkin menjadi kepala daerah pertama di Indonesia yang memberi kesempatan terbuka kepada masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk menilai kinerja

pemerintahannya. Semangat keterbukaan di Kota Makassar karenanya layak diacungi jempol. Pada tahun 2011, audit sosial menginisiasi kerja sama dengan pemerintah kota untuk ikut serta melakukan audit sosial bersama dengan komunitas terhadap beberapa program prioritas satuan-satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Kota Makassar. Untuk selanjutnya, inisiatif audit sosial berkembang menjadi kerja sama audit pembangunan dengan Pemerintah Kota Makassar.

Pada tahun 2012, audit sosial mulai dianggarkan ke dalam APBD Kota Makassar melalui Bappeda Kota. Di periode ini pula, Wali Kota Makassar untuk pertama kalinya melakukan proses pertanggungjawaban publik langsung di hadapan warganya. Audit sosial melibatkan seluruh kecamatan (14 kecamatan) yang terbagi dalam lima wilayah komunitas di Kota Makassar. Untuk selanjutnya, audit sosial diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Makassar dan diakui sebagai mekanisme akuntabilitas pemerintah kota.

Pemilihan Wali Kota di tahun yang sama tidak menyurutkan inisiatif ini. Sepuluh kandidat pasangan kepala daerah secara bersama-sama menandatangani komitmen mereka untuk melanjutkan inisiatif audit sosial melalui nota kesepahaman bersama seluruh pasangan kandidat Wali Kota Makassar. Mereka juga berkomitmen untuk mengintegrasikan audit sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2013–2018.

Pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal (DIA) melanjutkan inisiatif audit sosial yang telah dirintis petahana Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Ramdhan Pomanto audit sosial diperkuat dengan penerapan metode sistem digital.

Selama perjalanannya, audit sosial telah membentuk pemahaman warga atas hak-hak mereka. Pengalaman-pengalaman dari lapangan menunjukkan bagaimana proses audit sosial berpeluang melibatkan lebih banyak orang untuk

mengawasi pembangunan. Audit sosial menjadi pintu masuk pengawasan dan partisipasi berbasis masyarakat.

Setiap hasil temuan proses audit sosial dicatat dan terus-menerus dikomunikasikan kepada para pihak terkait yang berkepentingan. Pemeriksaan atas bukti-bukti klaim pembangunan telah membuka kesempatan bagi warga untuk lebih kritis. Harapannya, tentu saja perbaikan kinerja pembangunan terhadap dampak sosial yang ditimbulkannya di tengah masyarakat. Pada tahun 2014, Kota Makassar mendapatkan anugerah Otonomi Awards kategori akuntabilitas publik atas pelaksanaan audit sosial di Kota Makassar.

# Inspirasi dari kota–kota dunia –Anggaran dan Perencanaan Partisipatif

Tujuan terkait SDGs: SDGs #16

## Kota Paris, Prancis

Selain tersohor sebagai kota mode, Paris, Prancis, kini menyandang julukan baru sebagai Kota Partisipatif. Di bawah wali kota terpilih Maret 2014 lalu, Pemerintah Kota Paris meluncurkan program partisipasi yang memungkinkan sekitar 2,2 juta warganya untuk dapat mengusulkan dan memilih program serta kegiatan yang didanai oleh pemerintah.

Hanya berselang enam bulan sejak terpilih sebagai wali kota perempuan pertama di Kota Paris, Anne Hidalgo telah mengalokasikan dana untuk program–program yang langsung dipilih warganya melalui website <https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/>. Pemerintah kota juga membuka kotak pemungutan suara bagi warga yang hendak memberikan suara mereka dengan cara–cara tradisional.

Pada tahun pertama, tahun 2014, pemerintah melakukan uji coba via internet dan pencoblosan secara langsung dengan menyisihkan anggaran sebesar 20 juta euro (5 persen dari total APBD Kota Paris). Pemerintah mengajukan 15 calon proyek dan warga memilihnya. Pemilihan ini dilaksanakan sejak 24 September hingga 1 Oktober.

Hasilnya lebih 41 ribu warga Paris memberikan suara mereka untuk sembilan proyek terpilih. Sebagian besar proyek yang terpilih tersebut adalah proyek lingkungan hidup. Proyek penghijauan dinding gedung paling banyak memperoleh

suara. Disusul proyek pembangunan kebun belajar di sekolah dasar serta proyek untuk mengubah lahan telantar dan kumuh di pinggiran kota menjadi ruang seni, pameran, aula pemutaran film, dan sejenisnya.

Pada tahun kedua (2015), pemerintah meningkatkan alokasi anggaran terhadap program ini hingga 65 juta euro dan membuka diri kepada semua jenis usulan warga atau tidak lagi terbatas kepada calon proyek yang diajukan oleh pemerintah. Selama enam tahun hingga 2020, Pemerintah Paris akan mengalokasikan anggaran hingga 500 juta euro untuk diputuskan penggunaannya secara langsung oleh wargan Kota Paris. Ini adalah jumlah yang terbesar yang pernah dilakukan oleh sebuah kota melalui suara, keputusan dan partisipasi warganya.

Praktik penganggaran partisipatif di Kota Paris mendapat perhatian luas dari berbagai media internasional seperti *The Guardian* dan *Huffington Post*. Sebelumnya, beberapa kota kecil di sekitar Paris telah memulai praktik partisipasi anggaran, seperti Kota Saint-Dennis dengan jumlah penduduk 86.000, Kota Issy-les-Moulineaux (jumlah penduduk 60.000), dan Kota Bobigny (dengan penduduk 40.000).

## Kota Reykjavik, Islandia

Lain di Paris, lain pula di Islandia. Kota Reykjavik adalah ibu kota Islandia, Eropa Utara. Sebagai kota besar dengan jumlah penduduk lebih dari 120 ribu jiwa, Reykjavik memerankan tiga fungsi sekaligus, yakni pemerintahan, perdagangan, dan pariwisata.

Pada tahun 2009, di kota ini lahir sebuah program terobosan bernama “Reykjavik Yang Lebih Baik” (*Betri Reykjavik*), sebuah website <https://betrireykjavik.is/> yang diluncurkan oleh para pegiat masyarakat sebagai sebuah cara untuk membuka kanal partisipasi langsung dari setiap warga kota.

Melalui *Betri* Reykjavik, warga memiliki kesempatan secara langsung untuk mengajukan beragam usulan, memperdebatkannya serta mengusulkan prioritas bagi para wakil mereka yang duduk di DPRD kota. Hanya berselang satu tahun atau pada 2010, platform ini kemudian diadopsi oleh pemerintah kota yang baru memenangi pemilu. Selama empat tahun, hampir 70 ribu atau lebih dari separuh warga kota telah menggunakan platform ini untuk mengajukan hingga 1.800 usulan pembangunan menurut mereka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 450 usulan menjadi pertimbangan resmi dan 350 di antaranya telah disetujui dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah kota.

Platform ini telah memungkinkan munculnya interaksi langsung antara warga dan wakil mereka di parlemen, yang memungkinkan mereka mempengaruhi pengambilan keputusan pembangunan secara langsung bagi kota mereka. Platform ini kemudian diadopsi di Inggris, Balkan, dan sejumlah negara lain.

## **Kota Porto Alegre, Brazil**

Porto Alegre merupakan legenda dalam hal penganggaran partisipatif, terutama karena kota ini telah menjadi inspirasi bagi banyak kota dunia lainnya dalam melaksanakan partisipasi.

Penganggaran partisipatif di Porto Alegre telah dilaksanakan selama 15 tahun sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1989. Penganggaran partisipatif secara resmi dilaksanakan oleh pemerintah koalisi yang dipimpin oleh Partai Buruh (*Partido Trabalhadores* atau PT) setelah memenangi pemilu kota di tahun 1989, dengan dua program pokok yaitu; (a) membalikkan investasi dari wilayah kaya ke wilayah miskin; dan (b) partisipasi.

Dalam perjalanannya, program ini juga bertujuan mengatasi ketimpangan kronis di Brasil dan Kota Porto Alegre pada khususnya, yang sepertiga warga Porto belum memiliki akses air bersih, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tinggal di daerah-daerah kumuh perkotaan.

Rata-rata sekitar 20 persen anggaran kota telah dialokasikan setiap tahun melalui proses partisipasi warga ini. Metode penganggaran partisipasi bertumpu pada dua cara, yaitu musyawarah warga di 16 wilayah untuk membahas proyek yang paling dibutuhkan, dan pemilihan wakil-wakil warga yang akan mengawal setiap usulan mereka nantinya. Proses ini berjalan selama tiga hingga empat bulan dan dilanjutkan dengan tahap perundingan dengan pemerintah kota.

Oleh para wakil warga terpilih, usulan-usulan warga tersebut kemudian dirundingkan untuk dipilih dan diputuskan sebagai proyek yang disertai pula dengan alokasi anggaran. Hasil perundingan ini kemudian dilaksanakan oleh pemerintah kota. Proyek-proyek yang belum disetujui akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Pada perjalanannya, pemerintah kota semakin terbuka terhadap setiap anggaran pembangunan kota, dan berupaya menjelaskan secara langsung apa-apa saja komponen belanja dalam anggaran kota, termasuk gaji dan fasilitas wali kota beserta jajarannya.

Hasilnya luar biasa, di antaranya, munculnya partisipasi langsung warga yang selama ini tidak terlibat, termasuk dari kaum perempuan dan kaum miskin. Tercatat lebih dari 100 ribu warga telah terlibat di dalam prosesnya. Proses ini telah meningkatkan investasi ke wilayah-wilayah miskin dan kumuh dalam berbagai bentuk perbaikan sarana-prasana, ketersediaan sekolah, dan fasilitas air minum, listrik dan jalan. Melalui partisipasi pula, angka kematian balita dan kemiskinan mulai turun secara signifikan.

Pengalaman Kota Porto Alegre telah banyak diadopsi di berbagai kota di Jerman, Prancis, Italia, Amerika Serikat, Kanada, dan kota-kota di dunia lainnya. Diperkirakan lebih 1,000 kota di dunia telah belajar dan menerapkan model penganggaran dan perencanaan partisipatif Porto Alegre. Pengalaman kota ini juga sudah banyak diulas dan menjadi rujukan berbagai lembaga internasional seperti UNESCO, UN Habitat, IDB, Bank Dunia, dan organisasi lainnya.

# Inspirasi dari kota–kota dunia – Perlindungan Sosial dan Jaminan Pendapatan Dasar

Tujuan terkait SDGs: SDGs #1; SDGs #10; SDGs #5

## Kota–Kota di Belanda

Baru–baru ini sejumlah kota di Belanda menjadi berita besar dan menyita perhatian publik dunia. Kota–kota di Belanda itu adalah Utrecht, Groningen, Tilburg, dan Wageningen yang sedang merancang program jaminan sosial baru yaitu *Basic Income*.

Kota Utrecht dengan jumlah penduduk mencapai 640 ribu jiwa merupakan kota terbesar keempat di Belanda. Pada Januari 2016 mendatang, pemerintah kota akan melaksanakan uji coba *Basic Income* bekerja sama dengan Universitas Utrecht.

Uji coba akan diadakan selama beberapa tahun untuk mengetahui setidaknya dua hal; (a) apakah akan ada pengurangan partisipasi kerja (jam kerja, jumlah pekerja, produktivitas), serta (b) kemudahan sistem, apakah akan lebih sederhana ketimbang sistem dan mekanisme jaminan sosial pada periode sebelumnya.

Salah satu alasannya adalah sistem perlindungan sosial yang ada dipandang sudah tidak memadai dan terlalu rumit, sehingga banyak kelompok warga yang tertinggal (khususnya mereka yang menganggur, setengah menganggur, ibu rumah tangga, dan pekerja lepas). Dampaknya adalah kemiskinan dan ketimpangan.

Pada tahun 1981, lembaga kajian ilmiah pemerintah Belanda bernama WRR ([www.wrr.nl](http://www.wrr.nl)), menerbitkan laporan perihal berbagai pilihan kebijakan yang perlu ditempuh oleh pemerintah. Salah satunya adalah Basic Income.

Di masa lalu, sebuah kota di Kanada, Dauphin di Manitoba, telah menguji coba jaminan tunai ini, antara tahun 1974 dan 1979. Programnya disebut sebagai Mincome. Ekonom Kanada Evelin L. Forget dalam penelitiannya tahun 2011 “the Town with no Poverty” menemukan bahwa program itu berhasil menurunkan kemiskinan dan masalah lainnya.

Memang terjadi dampak yaitu menurunnya jam kerja, namun hal ini lebih banyak ditemukan pada anak muda, yang ternyata mengalokasikan waktunya lebih untuk belajar atau bersekolah dan ibu rumah tangga, yang banyak memberikan waktunya untuk mengurus anak dan rumah tangga.

## **Alaska, Amerika Serikat**

Negara bagian Alaska di Amerika Serikat sejak tahun 80-an telah melaksanakan program Tunjangan Tunai Tanpa Syarat bagi semua warganya. Sumber dananya berasal dari pendapatan sumber daya alam, terutama minyak. Kini, jumlah penduduk Alaska lebih dari 644 ribu jiwa.

Setiap tahun, warga akan menerima dana secara perseorangan. Praktik ini sama seperti warga adalah pemegang saham yang setiap tahun menerima dana bagi hasil keuntungan perusahaan. Besaran dana yang diterima oleh setiap warga tergantung pada hasil investasi. Pada tahun 2015, dilaporkan setiap warga menerima dana sebesar 2,000 dolar. Total besaran dana yang dibagi kepada warga merupakan 25 persen dari dana hasil investasi dan dana cadangan atau dana abadi. Pengelolaannya diserahkan kepada badan yang dibentuk pemerintah yaitu **The Alaska Permanent Fund Corporation**.

Pemerintah menyadari bahwa sumber daya alam nantinya akan habis atau tidak berkelanjutan. Pemerintah juga menyadari bahwa tidak semua warga dapat mengakses atau menikmati manfaatnya secara setara. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengelola dana hasil minyak ke dalam tiga bentuk: (i) untuk biaya operasional pemerintah (APBD); (ii) untuk tabungan abadi; dan (iii) untuk dibagikan kepada setiap warganya setiap tahun.



**4 KUALITAS PENDIDIKAN  
YANG BAIK**



**5 KESETARAAN GENDER**



**10 MENGURANGI  
KETIMPANGAN**



**11 PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN**



**16 PERDAMAIAN DAN  
KEADLIAN**



**17 REVITALISASI  
KEMITRAAN GLOBAL**



## BAB 4

# MELAKSANAKAN SDGS DI DAERAH

## 1. Rencana Aksi

Kriteria pokok untuk menyusun Rencana Aksi (Renaksi) SDGs daerah ada dua yaitu: (a) *keadilan substantif*, yaitu sejauh mana prioritas dan program mampu menjawab kebutuhan warga sebagaimana ditetapkan oleh dokumen SDGs dengan 17 Tujuan dan 169 Sasaran SDGs; (b) *keadilan prosedural*, yaitu sejauh mana warga dan para pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan rencana aksi, bukan hanya tokoh masyarakat dan mereka yang berpengaruh. Artinya, dokumen Renaksi SDGs perlu disusun secara terbuka, konsultatif dan partisipatif, termasuk melibatkan kaum perempuan, kelompok minoritas, dan kaum marjinal.

SDGs adalah milik dan tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan kelompok masyarakat sipil semata. Pemerintah kabupaten dan kota merupakan *ujung tombak realisasi SDGs*. Tanpa peran aktif mereka, maka SDGs hanya akan gagal atau tercapai sepertiganya.

*Keberhasilan SDGs* di daerah juga akan menaikkan kepercayaan dan dukungan warga kepada pemerintah mereka. Pada gilirannya, keberhasilan pelaksanaan SDGs akan memberikan insentif politik bagi para kepala daerah. Bukan saja reputasi yang meningkat akan tetapi juga profil pemimpin daerahnya.

Renaksi SDGs Daerah merupakan *prioritas daerah* dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah. Prioritas ini kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun.

Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu (i) bagaimana *fokus dan sasaran* khusus SDGs di daerah; dan (ii) bagaimana SDGs *diarusutamakan ke dalam seluruh* kebijakan dan program pemerintah daerah.

Fokus, misalnya, (a) menurunkan ketimpangan pelayanan kesehatan dan pendidikan antar-wilayah; (b) menyediakan air bersih hingga 100 persen untuk semua wilayah; (c) menyediakan akta kelahiran bagi 100 persen penduduk dan warga. Pengarusutamaan, misalnya, (a) kebijakan antikorupsi 0 persen untuk semua pelayanan publik; dan (b) kebijakan non-diskriminasi untuk semua bidang.

Jika misalnya sebuah daerah telah memiliki rencana prioritas lima tahunan, SDGs dapat mempertajam sasaran dan hasilnya. Misalnya, jika target cakupan sanitasi dan air minum di daerah itu baru mencapai 50 persen, Renaksi SDGs bisa memperkuatnya dengan target capaian hingga 75 persen atau bahkan 100 persen dalam lima tahun.

Renaksi perlu disusun secara *partisipatif* dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti kelompok-kelompok masyarakat sipil, kelompok perempuan, pemuda, kelompok disabilitas, kelompok miskin serta wakil-wakil organisasi seperti universitas, organisasi profesi, kelompok bisnis dan jurnalis. Jika dokumen Renaksi telah selesai disusun, dokumen ini perlu *dibuka dan terbuka* kepada publik agar dapat dipantau kemajuan, capaian, serta kendala-kendalanya.

Tata cara pelaksanaan penyusunan Renaksi dapat dilakukan sebagai berikut: (i) jangka waktu enam bulan; (ii) membuka ruang partisipasi warga; dan (iii) melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para ahli. Adapun langkah-langkah penyusunan Renaksi dapat melalui serangkaian proses sebagai berikut;

**a. Survei warga** guna mengetahui aspirasi dan kebutuhan warga, terutama untuk mendengarkan dan memperoleh masukan dari warga dan wilayah yang terpinggirkan, marjinal, dan miskin.

- b. Penyusunan prioritas** dan program.
- c. Konsultasi publik dengan warga** dan dengan dinas ataupun dengan kelompok masyarakat (melalui diskusi kelompok terfokus, seminar, dan dialog publik)
- d. Estimasi pagu anggaran** yang akan dibutuhkan untuk membiayai seluruh prioritas untuk periode satu hingga lima tahun.
- e. Konsultasi** dengan DPRD.
- f. Finalisasi** dokumen Renaksi.

## Boks 6: Pemda dan SDGs

15 Wewenang Pemda (UU 32/2004)	17 Goal SDGs
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Melindungi masyarakat</b>, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>2. Meningkatkan <b>kualitas kehidupan</b> masyarakat.</li> <li><b>3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.</b></li> <li>4. Mewujudkan <b>keadilan dan pemerataan.</b></li> <li>5. Meningkatkan pelayanan <b>dasar pendidikan.</b></li> <li>6. Menyediakan fasilitas <b>pelayanan kesehatan.</b></li> <li>7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.</li> <li>8. Mengembangkan sistem <b>jaminan sosial.</b></li> <li>9. Menyusun perencanaan dan <b>tata ruang daerah.</b></li> <li>10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.</li> <li><b>11. Melestarikan lingkungan hidup.</b></li> <li>12. Mengelola administrasi kependudukan.</li> <li>13. Melestarikan nilai sosial budaya.</li> <li>14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goal 1. Menghapus kemiskinan</li> <li>• Goal 2. Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan</li> <li>• Goal 3. Kesehatan untuk semua umur</li> <li>• Goal 4. Pendidikan yang berkualitas dan merata</li> <li>• Goal 5. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan</li> <li>• Goal 6. Ketersediaan air minum dan sanitasi untuk semua</li> <li>• Goal 7. Energi untuk semua</li> <li>• Goal 8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja layak</li> <li>• Goal 9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan</li> <li>• Goal 10. Menurunkan ketimpangan</li> <li>• Goal 11. Kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan</li> <li>• Goal 12. Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan</li> <li>• Goal 13. Melawan perubahan iklim dan dampaknya</li> <li>• Goal 14. Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam</li> <li>• Goal 15. Melindungi dan merestorasi ekosistem, dan perlindungan hutan</li> <li>• Goal 16. Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non-diskriminasi</li> <li>• Goal 17. Kerja sama internasional yang semakin kuat</li> </ul>

## 2. Panitia Pelaksana

Panitia bersama yang partisipatif dan inklusif sangat penting untuk memastikan Renaksi yang tepat, realistis, dan dapat diwujudkan dengan baik.

Pemerintah daerah perlu membentuk *Panitia SDGs yang inklusif dan partisipatif*. Selain melibatkan unsur pemerintah, kepanitiaan SDGs juga harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk keterwakilan politik dari DPRD. Panitia bersama ini diharapkan dapat membentuk satu sekretariat bersama.

Kepanitiaan bersama terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana serta didukung oleh *sekretariat pelaksana* SDGs. Kepanitiaan dapat dipimpin oleh Kepala Bappeda atau kepala dinas serta diketuai bersama oleh wakil dari kelompok masyarakat sipil dan beranggotakan 7 hingga 11 orang.

Sekretariat bersama SDGs akan mengerjakan beberapa hal *teknis* yang sangat diperlukan mulai dari (i) penyusunan Renaksi, (ii) sosialisasi–diseminasi informasi, hingga (iii) pengawasan pelaksanaan.

**Target kerja dan hasil kerja** Panitia dan Sekretariat Bersama di antaranya (a) menyelesaikan Renaksi daerah; (ii) menyiapkan dasar hukum seperti peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbub) dan peraturan wali kota (perwali); (c) membagi tugas di antara dinas–dinas dan anggarannya; serta (d) melakukan pemantauan dan pengawasan.

## 2. Kelembagaan

Untuk mendukung Rencana aksi dan kepanitiaan yang dibentuk, pemerintah daerah perlu menyiapkan kelembagaan yang dibutuhkan.

Yang pertama harus dilakukan adalah menetapkan siapa yang akan menjadi *leading agencies* atau badan yang akan memimpin perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan Renaksi SDGs daerah. Bappeda dapat menjadi *leading agency* dengan pertimbangan wewenang, peranan, dan keahliannya dalam perencanaan pembangunan.

Isu kelembagaan kedua adalah regulasi daerah yang akan mendukung seluruh langkah dan kegiatan Panitia SDGs, yang antara lain dapat berupa perda, perbup, dan perwali.

Proses menghasilkan perda, perbup, atau perwali akan menjadi bukti nyata komitmen atas SDGs. Di sinilah komitmen politik para pimpinan dan kepala daerah dibutuhkan. Kerja sama antara kepala daerah dan DPRD menjadi penting agar tercipta sinergi kepemimpinan yang baik dari sisi eksekutif ataupun dari legislatif daerah.

Isi perda, perbup atau perwali akan terdiri dari sedikitnya empat hal utama, yaitu (a) Rencana Aksi SDGs—yaitu bagaimana SDGs **diarusutamakan** ke dalam seluruh sasaran pembangunan daerah; (b) Fokus Rencana Aksi —yaitu bagaimana SDGs **difokuskan** ke dalam tujuan dan sasaran tertentu selama periode lima tahun; (c) pelaksana dan panitia SDGs; serta (d) bagaimana pelaksanaan SDGs itu akan dipantau dan dievaluasi.

### 3. Pendanaan

Rencana aksi SDGs telah memuat prioritas dan bidang-bidang yang akan menjadi sasaran pemerintah daerah. Rencana aksi dengan demikian sudah menjawab apa dan ke mana alokasi anggaran serta sumber daya pemerintah daerah akan diprioritaskan.

Walau demikian, rencana aksi dan kepanitiaan SDGs akan tidak berguna jika tidak ada dukungan pendanaan nyata. Karena itu, pemerintah daerah wajib menyatakan keputusan tentang anggaran untuk mencapai target SDGs di daerahnya.

Sumber pendanaan secara umum dapat dibagi ke dalam dua, yaitu (i) APBD dan non-APBD; dan (ii) bantuan dari berbagai pihak seperti lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perusahaan yang dapat memperkuat pembiayaan SDGs di daerah.

Pendanaan SDGs di daerah akan bertumpu pada ketersediaan *ruang fiskal daerah*. Pada kenyataannya, besaran ruang fiskal di 500-an kabupaten dan kota di Indonesia berbeda-beda. Daerah kaya (dengan ruang fiskal yang besar) diharapkan dapat menjadi pelopor dalam pelaksanaan SDGs.

Meski begitu, ketersediaan dana bukanlah faktor yang menentukan berjalan-tidaknya pelaksanaan SDGs di daerah, melainkan *komitmen politik* dari para kepala daerahnya. Pendanaan SDGs karenanya, mensyaratkan komitmen dari kepala daerah dan kelompok-kelompok reformis di daerah.

Rencana aksi perlu didukung oleh rencana pendanaan. Rencana pendanaan dapat berupa dua hal, yaitu (i) *tambahan anggaran atau realokasi* anggaran untuk bidang dan sektor tertentu yang menjadi prioritas dalam Renaksi SDGs; (ii) *efisiensi dan penghematan* terhadap bidang-bidang tertentu agar dana dapat dialokasikan ke wilayah yang lebih mendesak dan sangat diperlukan untuk mendukung Renaksi SDGs.

*Realokasi* dapat dilakukan dengan patokan dan pagu anggaran misalnya alokasi lima persen untuk pendidikan dan kesehatan. Realokasi juga dapat menggunakan rumus makro berupa 40 persen belanja pemerintah termasuk belanja politik untuk biaya DPRD dan 60 persen belanja program.

Ciri-ciri	Model Lama	Model SDGs
Ketepatan waktu pelaksanaan anggaran	Terlambat	Tepat waktu
Penyerapan anggaran	Rendah	Sesuai rencana
Data dan informasi anggaran	Tertutup	Terbuka
Akuntabilitas anggaran	Rendah	Tinggi

## 5. Mekanisme Akuntabilitas

Bagaimana kita dapat mengetahui apakah SDGs telah dilaksanakan? Bagaimana kita juga dapat tahu bahwa Renaksi SDGs telah tercapai atau justru meleset? Mekanisme akuntabilitas sangat penting dan berguna untuk menjawab pertanyaan ini.

Mekanisme akuntabilitas adalah *cara dan metode* agar semua pemangku kepentingan memahami dan ikut serta dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan SDGs.

Sekurangnya ada dua fondasi penting akuntabilitas yang perlu ditekankan, yaitu (a) penetapan *indikator* capaian lokal; dan (b) produksi *data-data* yang relevan.

Salah satu contoh yang dapat diuji coba dan dilakukan, di antaranya *audit sosial*—secara rutin dilakukan setiap enam bulan atau satu tahun, pemerintah melaksanakan audit sosial terhadap pelayanan publik dan/atau program pemda.

Panitia SDGs perlu menyusun *laporan tahunan* atas dasar data yang valid dan bersumberkan data yang lebih beragam termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan kelompok–kelompok masyarakat sipil serta pemangku kepentingan lainnya.

## 6. Sosialisasi

Sosialisasi dan diseminasi bersifat wajib dan sangat penting. Semakin warga mengetahui dan memahami apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, akan semakin besar kemungkinan warga untuk mendukung upaya yang akan dan sedang dilaksanakan oleh pemerintahnya.

Pada intinya, kegiatan ini merupakan perwujudan dari Tujuan No. 16 SDGs yaitu pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Kegiatan dan langkah–langkah ini juga merupakan langkah pertama untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan SDGs.

Sosialisasi yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah secara *internal* kepada para kepala dinas dan seluruh perangkat jajaran pemda dan DPRD. Selanjutnya, tentu saja kepada publik dan terutama kelompok-kelompok masyarakat di wilayah yang selama ini masih tertinggal dan marjinal.

Sosialisasi–diseminasi dapat forum–forum tatap muka (*offline*) ataupun menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, melalui *website* dan media sosial.

Bahan utama sosialisasi–diseminasi di antaranya:

- a. Apa itu SDGs dan mengapa penting bagi pemerintah daerah dan warga?
- b. Apa itu Renaksi SDGs yang telah disusun; termasuk di dalamnya target–target yang akan dicapai dalam waktu lima tahun ke depan;
- c. Siapa saja anggota Panitia SDGs, termasuk cakupan kerja dan hasil kerjanya;
- d. Apa yang *akan dinikmati* dan *diperoleh* warga dan masyarakat bila Renaksi dijalankan dengan baik –misalnya semua warga akan memperoleh dan memiliki akta kelahiran dan kartu tanda penduduk (KTP), semua anak akan menikmati sekolah dasar dan menengah, ketersediaan air minum, pelayanan kesehatan, kemudahan mencari kerja, dukungan pemerintah yang lebih kuat untuk sektor pertanian, dan sebagainya.

# DAFTAR PUSTAKA

Apfc.org. *Alaska Permanent Fund Corporation*. <http://www.apfc.org/home/Content/home/index.cfm>.

AR, Mustopadidjaja, *et, al. Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Nasional 1945–2025*. Jakarta: LP3ES, 2012.

Arifin, Kamil Alfi. *Kota Ramah Ahmadiyah dalam Buletin Pranala Pusham UII*. Edisi 03 Mei–Juni 2015. <http://e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=361>

Barber, Benjamin R. *If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities*. Yale University Press, 2013.

Bappeda Kulon Progo. *Kabupaten Banjar Tertarik Pengentasan Kemiskinan di Kulon Progo*. <http://bappeda.kulonprogokab.go.id/article-105-kabupaten-banjar-tertarik-pengentasan-kemiskinan-di-kulon-progo.html>

Bappeda Kota Banda Aceh. *Program strategis: MUSRENA*. <http://bappeda.bandaacehkota.go.id/program-strategis/musrena/>

Bappeda Provinsi DIY. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015: Kabupaten Kulon Progo*. [http://bappeda.jogjaprov.go.id/assets/uploads/docs/RKPD\\_Kulon\\_Progo.pdf](http://bappeda.jogjaprov.go.id/assets/uploads/docs/RKPD_Kulon_Progo.pdf)

Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. *Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peran Aparatur Pemerintah Daerah sebagai Pendamping Keluarga Miskin*. [http://jdih.kulonprogokab.go.id/dl\\_jump.php?id=1161](http://jdih.kulonprogokab.go.id/dl_jump.php?id=1161)

BPS Kulon Progo. *Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 2005–2013*. <http://kulonprogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/15>

\_\_\_\_\_. *Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo 2013*. [http://kulonprogokab.bps.go.id/backend/pdf\\_publikasi/Rasio-Gini-Kabupaten-Kulon-Progo-2013.pdf](http://kulonprogokab.bps.go.id/backend/pdf_publikasi/Rasio-Gini-Kabupaten-Kulon-Progo-2013.pdf)

Citizen.is. *Better Reykjavik – Connects citizens to city hall*. <http://www.citizens.is/portfolio/better-reykjavik-connects-citizens-and-administration-all-year-round/>.

Coonrod, John. *From MDGs to SDGs: What's Different?* in Beare, Kern. <http://www.feelgood.org/MDGs-SDGs-whats-different-kern-beare/>

Fajar Institute Pro Otonomi. *Audit Sosial Berbasis Masyarakat*. <http://www.fipo-fajar>.

org/index.php?option=com\_content&view=article&id=139:audit-sosial-berbasis-masyarakat-&catid=41:performa-politik&Itemid=74

Forget, Evelyn L. *The Town with No Poverty: Using Health Administration Data to Revisit Outcomes of a Canadian Guaranteed Annual Income Field Experiment*. [http://public.econ.duke.edu/~erw/197/forget-cea%20\(2\).pdf](http://public.econ.duke.edu/~erw/197/forget-cea%20(2).pdf).

Harian Umum *Kompas*. *Angka Kematian Ibu Tertinggi ada di Jawa Barat*. <http://health.kompas.com/read/2014/12/05/074000923/Angka.Kematian.Ibu.Tertinggi.ada.di.Jawa.Barat>

\_\_\_\_\_. *Angka Kematian Ibu Tinggi, Ganjar Mengaku Galau*. <http://regional.kompas.com/read/2015/06/11/14270901/Angka.Kematian.Ibu.Tinggi.Ganjar.Mengaku.Galau>

\_\_\_\_\_. *Jangan Ayam Mati di Lumbung*. Nusantara, *Kompas*, Sabtu, 23 Mei 2015. <http://print.kompas.com/baca/2015/05/23/Jangan-Ayam-Mati-di-Lumbung>

Hoelman, Mickael B. (Ed.). *Audit Sosial di Mata Pelaku: Bunga Rampai Pengalaman dari Berbagai Daerah*. Yayasan Tifa, 2014.

Initiatives for Governance Innovation. *Menjadikan Perempuan Bersuara: Inspirasi dari MUSRENA Kota Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam*. [http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index2.php?option=com\\_sobi2&sobi2Task=dd\\_download&fid=42&format=html&Itemid=56](http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index2.php?option=com_sobi2&sobi2Task=dd_download&fid=42&format=html&Itemid=56)

Jamkesda DKI Jakarta. *Manual pelaksanaan Jamkesda DKI*. <http://www.jamkesdadki.net/manlak.pdf>

Kabupaten Kulon Progo. *Ikrar Gerakan Beli Kulon Progo, Bela Kulon Progo*. [http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Ikrar-Gerakan-Beli-Kulon-Progo--Bela-Kulon-Progo\\_2673](http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Ikrar-Gerakan-Beli-Kulon-Progo--Bela-Kulon-Progo_2673)

\_\_\_\_\_. *Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Traktor Quick*. <http://www.kulonprogokab.go.id/v21/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=2670>

\_\_\_\_\_. *Verifikasi Kabupaten Sehat; dr. Ann Nilai Inovasi di Kulon Progo Luar Biasa*. [http://www.kulonprogokab.go.id/v21/dr-Ann-Nilai-Inovasi-di-Kulon-Progo-Luar-Biasa\\_3898](http://www.kulonprogokab.go.id/v21/dr-Ann-Nilai-Inovasi-di-Kulon-Progo-Luar-Biasa_3898)

Kabupaten Wonosobo. *Naskah Akademik Kota Ramah HAM Kabupaten Wonosobo*. <http://infid.org/pdfdo/1422939377.pdf>

Kuncoro, Mudrajad. *Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.

Local Authorities Major Group 's (LAMG). *Advancing with Sustainable Development Goals at the local and subnational level*. Position paper March 2015. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13509authorities.pdf>

Mairie de Paris. *Notre budget, notre ville, notre décision*. <https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/>

Mary, Siti Rakhma, *et. al.* *Public Review Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan*. Jakarta: ICW-HuMa, 2013.

Nastiti, Sri Indah Wibi, *et. al.* *Dokumentasi Best Practice Kota-kota Jilid 8*. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), 2012.

Nugroho, Yanuar. *Some notes on Preparation for the implementation of the Post-2015 Development Agenda / SDGs / Agenda 2030*. Presentasi di Konferensi INFID, Jakarta, 6 Oktober, 2015.

Nurba, Muhary Wahyu dan Simolla, Nurliah. *Membangun Percaya Diri Warga Menuntut Akuntabilitas: Kisah Implementasi Audit Sosial dari Makassar*. Yayasan Tifa, 2012.

OECD. *The Governance Cluster: Accountability in Development Cooperation – a gender issue or not?* <http://www.oecd.org/dac/gender-development/45744086.pdf>. OECD, 2009.

Parhusip, Bona Tua Parlinggoman and Hoelman, Mickael B. *Delivering the Promise of Post-2015 Development Agenda in Indonesia*. Riset. Save the Children Indonesia, 2015.

Republika.co.id. *Kematian Ibu Masih Tertinggi di Surabaya*. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/10/25/nwrv8w384-kematian-ibu-masih-tertinggi-di-surabaya>.

Saputra, Wiko, *et. al.* *Efektivitas Kebijakan Daerah dalam Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7, No. 12, Juli 2013.

Saputra, Wiko dan Nurrizka, Rahmah Hida. *Prakarsa Policy Update*, September, 2013.

Semarangbisnis.com. *Turunkan Angka Kemiskinan 2% Per Tahun, Ini Kiat Kulon Progo*. <http://semarang.bisnis.com/read/20150730/1/80793/turunkan-angka-kemiskinan-2-per-tahun-ini-kiat-kulon-progo>

Suarajakarta.co. *Beberapa Masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS)*. <http://suarajakarta.co/lifestyle/kesehatan/beberapa-masalah-kartu-jakarta-sehat-kjs/>

Suaramerdeka.com. *Angka Kemiskinan di Kulon Progo Turun Drastis*. <http://berita.suaramerdeka.com/angka-kemiskinan-di-kulonprogo-turun-drastis/>

Theguardian.com. *Parisians have their say on city's first €20m 'participatory budget'*. <http://www.theguardian.com/cities/2014/oct/08/parisians-have-say-city-first-20m-participatory-budget>.

Tim BPS. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2011*. Jakarta: BPS, 2011.

UCLG. *UCLG and Global Taskforce advocacy pays off in SDGs Outcome Document 'Transforming Our World'*. <http://www.uclg.org/en/media/news/uclg-and-global-taskforce-advocacy-pays-sdgs-outcome-document-transforming-our-world>.

Unesco.org. *The Experience of the Participative Budget in Porto Alegre Brazil*. <http://www.unesco.org/most/southa13.htm>.

United Nations. *My World Survey*. <http://data.myworld2015.org/>

\_\_\_\_\_. *Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015*. [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E)

\_\_\_\_\_. *Sustainable Development Knowledge Platform*. SDGs & Topics. <https://sustainabledevelopment.un.org/topics>

\_\_\_\_\_. *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN, 2015. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>

Veron, Pauline. *Why Paris is Building the World's Biggest Participatory Budget*. New Cities Foundation. <http://www.newcitiesfoundation.org/why-paris-is-building-the-worlds-biggest-participatory-budget/>.

Wali kota Kota Banda Aceh. *Musrena: Tekad Illiza Wujudkan Banda Aceh sebagai Kota Ramah Gender*. <http://walikota.bandaacehkota.go.id/news/read/370/musrena--tekad-illiza-wujudkan-banda-aceh-sebagai-kota-ramah-gender.html>

Wardani, Sri Budi Eko, *et, al*. *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*. Jakarta: Puskapol Fisip UI, 2013.

World Bank. *Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Utara 2011 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembangunan di Bumi Niyur Melambai*. Jakarta: World Bank, 2011.

\_\_\_\_\_. *Analisis Keuangan Publik Provinsi Sulawesi Selatan 2012 Meningkatkan*

*Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Gerbang Indonesia Timur.* Jakarta: World Bank, 2012.

\_\_\_\_\_. *Analisis Keuangan Publik Sulawesi Tenggara 2014 Memelihara Momentum Pertumbuhan Tinggi, Berkelanjutan, dan Inklusif di Sulawesi Tenggara Melalui Pembangunan Sektor Pertanian dan Infrastruktur.* Jakarta: World Bank, 2014.

\_\_\_\_\_. *Analisis Keuangan Publik Sulawesi Selatan 2014 Mempertahankan Posisi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penggerak Utama Perekonomian Indonesia Timur Melalui Pembangunan Sektor Pertanian dan Infrastruktur.* Jakarta: World Bank, 2014.

\_\_\_\_\_. *Analisis Keuangan Publik Gorontalo 2014 Mempercepat Pembangunan daerah melalui Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Kesehatan.* Jakarta: World Bank, 2014.

\_\_\_\_\_. *Analisis Keuangan Publik Papua 2014 Mengoptimalkan Potensi Bonus Demografi di Papua Melalui Peningkatan Kualitas Belanja Publik Sektor Pendidikan dan Kesehatan.* Jakarta: World Bank, 2014.

\_\_\_\_\_. *Participatory Budgeting in Brazil.* World Bank, Tanpa tahun. [http://siteresources.worldbank.org/INTEMPowerment/Resources/14657\\_Particip-Budg-Brazil-web.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTEMPowerment/Resources/14657_Particip-Budg-Brazil-web.pdf).

[www.basicincome.org](http://www.basicincome.org).

[www.wrr.nl](http://www.wrr.nl).





**International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)**

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu  
Jakarta Selatan, 12540  
Phone : 021 7819734, 7819735  
Email : [infid@infid.org](mailto:infid@infid.org)  
Website : [www.infid.org](http://www.infid.org)